

## **CINDY ASTRIANI**

**Judul :** Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Perguruan Tinggi

**Informan :** Auditor Internal

**Target :** efektivitas audit internal, metode deteksi fraud, dan pemantauan sistem pengendalian.

**Pertanyaan wawancara :**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi audit internal dalam mencegah terjadinya kecurangan atau fraud di lingkungan kampus ini, dan seberapa sering audit dilakukan di masing-masing unit kerja?

### **Pembicara 2 (Auditor):**

Untuk mencegah kecurangan, sejak awal kami sudah membuat panduan berupa aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh unit-unit pelaksana, terutama terkait pelaporan keuangan. Kami berperan mencocokkan apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan aturan universitas.

Fungsi audit internal kami memang belum bisa dilakukan secara penuh seperti di perusahaan karena keterbatasan sumber daya. Misalnya, di perusahaan, laporan keuangan disusun oleh tim akuntansi. Tapi di fakultas dan unit, stafnya belum tentu berlatar belakang ekonomi atau akuntansi. Jadi kami lebih kepada pendampingan dan pembinaan di awal.

Audit internal kami dilakukan dua kali dalam setahun (per semester). Seiring waktu, pembinaan mulai berkurang karena sudah ada pemahaman yang lebih baik. Meski begitu, masih ada unit yang belum sepenuhnya menyesuaikan, sehingga pembinaan tetap diperlukan.

### **Pembicara 3:**

Memang banyak staf di biro, fakultas, dan UPT yang bukan berasal dari latar belakang keuangan. Ini yang membuat pelaporan keuangan menjadi tantangan. Oleh karena itu, langkah awal kami adalah membina dan menyelaraskan pemahaman, terutama dalam membuat laporan arus kas, penerimaan, dan pengeluaran.

2. Apakah dalam pelaksanaan audit internal digunakan standar atau pedoman tertentu, seperti kerangka kerja COSO atau lainnya? Jika ya, bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari?

Karena kami berada di lingkungan Muhammadiyah, kami mengikuti aturan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pedoman keuangan dan audit berasal dari sana. Jadi kami tidak mengikuti standar audit umum seperti SA (Standar Audit) yang biasa digunakan di KAP, karena sifatnya terlalu ketat. Di sini, aturannya lebih kontekstual dan toleran terhadap kondisi lembaga pendidikan.

### **Istilah yang digunakan pun kami sesuaikan.**

Daripada menggunakan istilah "audit" yang terdengar menakutkan bagi sebagian orang,

kami menggunakan istilah "verifikasi" atau "pembinaan." Karena kalau dibilang "audit," staf langsung membayangkan BPK, padahal maksud kami hanya ingin mencocokkan data saja.

3. Ketika auditor menemukan indikasi adanya fraud, apa langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan oleh tim audit dalam menangani temuan tersebut?

Kami melakukan audit sambil memberikan pembinaan. Jadi bukan hanya memberi teori lalu menunggu laporan selesai. Ketika kami turun ke unit-unit, kami menunjukkan bagaimana seharusnya laporan disusun, serta apa yang tidak sesuai pedoman.

Kesalahan yang kami temui biasanya bukan bentuk kecurangan (fraud), tetapi ketidaksesuaian administratif. Misalnya, penggunaan nota atau kuitansi yang dianggap cukup oleh staf, padahal secara akuntansi masih belum memenuhi standar.

**Penanya:**

Pernah menemukan tindakan fraud selama audit?

**Pembicara:**

Kami belum bisa menyimpulkan ada fraud. Paling sering, ada ketidakterbukaan atau kesalahan administrasi. Misalnya, ada pemasukan yang belum dibukukan. Tapi kami tidak langsung menyebut itu sebagai kecurangan. Kami telusuri terlebih dahulu. Biasanya hanya miskomunikasi atau keterlambatan administrasi, bukan fraud besar.

4. Bagaimana hubungan kerja atau kolaborasi antara auditor internal dan SPI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan risiko di kampus ini?

**Pembicara:**

Semua pengeluaran dari Biro Administrasi Keuangan (BAK) diverifikasi oleh SPI. Dana dari BAK yang dikucurkan ke fakultas atau UPT harus dipertanggungjawabkan, dan itu diawasi oleh SPI.

Kami juga memiliki sistem monitoring digital. Jadi semua proses pengajuan dana, verifikasi, pencairan, hingga pelaporan bisa kami pantau dalam sistem. Contohnya, fakultas mengajukan dana kegiatan, prosesnya terpantau mulai dari rektorat hingga kas besar/kecil. Progresnya terlihat jelas, siapa yang sudah menyetujui dan siapa yang belum.

Jika fakultas melihat pengajuan belum disetujui rektor, mereka tidak bisa lanjut. Tapi kalau sudah di-approve, mereka bisa konsultasi dengan BAK atau LSPI jika ada kendala.

5. Apakah audit internal kampus saat ini telah memanfaatkan teknologi seperti big data analytics atau software audit? Jika ya, bagaimana teknologi tersebut membantu dalam mendeteksi potensi kecurangan?

- Kolaborasi SPI, auditor internal, dan BAK dilakukan secara **terintegrasi melalui sistem digital**.
- Istilah "audit" dihindari karena stigma negatif, diganti dengan "verifikasi" atau "pembinaan."

**Informan:** Ketua BAK & Direktur Keuangan

**Target Informasi:** Sistem keuangan, tata kelola anggaran, transparansi, pencegahan fraud, integrasi sistem, dan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi.

**Pertanyaan wawancara :**

### **Pertanyaan 1:**

**Bagaimana sistem pengelolaan keuangan saat ini digunakan untuk mendukung pengendalian internal dan mencegah kecurangan di lingkungan kampus?**

**Narasumber:**

Saat ini sistem pengelolaan keuangan sudah jauh lebih baik. Kami telah melaksanakan proses audit internal secara rutin, dimulai dari tiap unit kerja. Prosedur-prosedur pun sudah kami lengkapi dan pedomannya tersedia.

Dalam pengendalian internal, salah satu prinsip penting adalah pemisahan fungsi antara pemegang uang, pencatat, dan pengawas. Seseorang tidak boleh merangkap dua fungsi ini karena berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Prinsip ini sudah menjadi standar yang kami terapkan, karena sebelum diaudit oleh auditor eksternal atau akuntan publik, pengendalian internal harus kuat terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan opini WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*).

### **Pertanyaan 2:**

**Apakah proses verifikasi dilakukan secara berlapis dalam sistem keuangan?**

**Narasumber:**

Iya, kami menerapkan sistem verifikasi berlapis. Misalnya, saat unit kerja mengajukan anggaran, mereka terlebih dahulu melihat rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing unit. Kemudian usulan itu diajukan ke Wakil Rektor terkait.

Setelah divalidasi, akan diproses ke tahap berikutnya. Jika disetujui, usulan pencairan akan diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan (BAK). Di sana akan dicek kesesuaian usulan dengan standar biaya, yang diperbaharui setiap tahun. Jika nilai usulan melebihi standar biaya, maka akan ditolak atau dikembalikan.

Setelah lulus verifikasi BAK, usulan masuk ke Wakil Rektor Bidang Keuangan untuk verifikasi lanjutan, dan jika sesuai, akan diteruskan ke Rektor untuk disetujui. Untuk

pengeluaran tertentu, seperti kas besar (di atas enam juta rupiah), prosedurnya lebih panjang karena perlu beberapa level persetujuan.

---

### **Pertanyaan 3:**

**Seberapa sering dilakukan evaluasi keuangan di tingkat fakultas atau unit kerja? Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?**

**Narasumber:**

Laporan keuangan disusun oleh Biro Keuangan secara bulanan. Evaluasi dilakukan dua kali setiap bulan—sebelum dan sesudah pengeluaran, dan dibandingkan dengan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja). Selain itu, ada evaluasi triwulanan dan rapat koordinasi antar biro dan pimpinan.

Audit internal juga dilakukan setiap tahun oleh tim yang dibentuk khusus, baik audit operasional maupun keuangan, untuk tiap unit kerja.

---

### **Pertanyaan 4:**

**Langkah nyata apa saja yang dilakukan oleh BAK atau Rektorat Keuangan dalam mencegah terjadinya kecurangan/fraud dalam transaksi atau pengadaan barang dan jasa?**

**Narasumber:**

BAK bertugas sebagai pihak pembayar. Untuk pengadaan, tanggung jawab ada pada unit bisnis atau BAU (Biro Administrasi Umum), tergantung jenis barang/jasa.

Setelah pengadaan selesai, BAU akan memverifikasi kesesuaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis dan membuat berita acara serah terima. Jika sudah sesuai, barulah BAK melakukan pembayaran berdasarkan invoice.

---

### **Pertanyaan 5:**

**Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi laporan keuangan dijaga? Apakah pelaporan keuangan sudah berbasis digital dan sesuai dengan standar akuntansi?**

**Narasumber:**

Pelaporan keuangan sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yakni SAK 35. Semua proses pengajuan dana dilakukan melalui platform digital **Cyber Campus**, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan.

Sementara untuk sistem pencatatan akuntansi dilakukan melalui **Sistem Informasi Administrasi (SIA)** UMS. Di sinilah semua transaksi keuangan dicatat secara *real-time* oleh

unit-unit terkait. Termasuk pencatatan kas kecil, kas besar, penyesuaian, hingga amortisasi aset dilakukan melalui sistem ini.

---

### **Pertanyaan 6:**

**Apakah sistem pengawasan keuangan sudah terintegrasi dengan sistem pengawasan internal seperti SPI atau LSPI?**

**Narasumber:**

Ya, sistem kami sudah terintegrasi dengan **SPI** (Satuan Pengawasan Internal). SPI dapat memantau semua aktivitas keuangan, bukan hanya di BAK tetapi juga di semua unit.

Kami juga memiliki **Whistle Blowing System (WBS)**, yang memungkinkan siapa saja melaporkan potensi penyimpangan secara langsung kepada SPI.

---

### **Pertanyaan 7:**

**Jika pernah terjadi penyimpangan atau masalah dalam keuangan, bagaimana mekanisme penanganannya dan apa tantangan dalam menjaga transparansi serta tata kelola keuangan?**

**Narasumber:**

Penyimpangan bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama adalah audit operasional yang dilakukan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), yang memastikan kepatuhan terhadap SOP. Kedua adalah audit keuangan, untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya. Ketiga adalah audit risiko, yang bersifat antisipatif terhadap risiko masa depan, seperti penurunan minat terhadap program studi tertentu.

Jika terjadi pelanggaran, penanganannya dilakukan secara bertahap: mulai dari teguran, peringatan, hingga PHK. Jika nilai penyimpangannya besar, bisa berujung pada tindakan hukum.

---

**Pewawancara:**

Baik Pak, itu semua pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang sangat membantu.

**Narasumber:**

Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang pas dari jawaban saya, bisa dikonfirmasi lagi ke pihak PHK sebelumnya.

**CINDY ASTRIANI**

**Judul :** Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Perguruan Tinggi

**Informan :** Auditor Internal

**Target :** efektivitas audit internal, metode deteksi fraud, dan pemantauan sistem pengendalian.

**Pertanyaan wawancara :**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi audit internal dalam mencegah terjadinya kecurangan atau fraud di lingkungan kampus ini, dan seberapa sering audit dilakukan di masing-masing unit kerja?

**Peran dan kontribusi audit internal dalam pencegahan fraud dan frekuensi audit:**

Audit internal berperan penting dalam pencegahan fraud melalui evaluasi sistem pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai pedoman. Audit dilakukan rutin setiap tahun terhadap semua unit kerja (33 unit), dengan klasifikasi tingkat pengendalian internal: kuat (21%), sedang (52%), dan lemah (27%).

**Pembicara 2 (Auditor):**

Untuk mencegah kecurangan, sejak awal kami sudah membuat panduan berupa aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh unit-unit pelaksana, terutama terkait pelaporan keuangan. Kami berperan mencocokkan apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan aturan universitas. Fungsi audit internal kami memang belum bisa dilakukan secara penuh seperti di perusahaan karena keterbatasan sumber daya. Misalnya, di perusahaan, laporan keuangan disusun oleh tim akuntansi. Tapi di fakultas dan unit, stafnya belum tentu berlatar belakang ekonomi atau akuntansi. Jadi kami lebih kepada pendampingan dan pembinaan di awal. Audit internal kami dilakukan dua kali dalam setahun (per semester). Seiring waktu, pembinaan mulai berkurang karena sudah ada pemahaman yang lebih baik. Meski begitu, masih ada unit yang belum sepenuhnya menyesuaikan, sehingga pembinaan tetap diperlukan

**Pembicara 3:**

Memang banyak staf di biro, fakultas, dan UPT yang bukan berasal dari latar belakang keuangan. Ini yang membuat laporan keuangan menjadi tantangan. Oleh karena itu, langkah awal kami adalah membina dan menyelaraskan pemahaman, terutama dalam membuat laporan arus kas, penerimaan, dan pengeluaran.

2. Apakah dalam pelaksanaan audit internal digunakan standar atau pedoman tertentu, seperti kerangka kerja COSO atau lainnya? Jika ya, bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari?

**Penggunaan standar atau pedoman:**

Audit internal mengacu pada pedoman dari Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah serta pedoman dari universitas. Meskipun COSO dikenal, implementasi yang digunakan lebih banyak bersumber dari pedoman internal Muhammadiyah sendiri.

Karena kami berada di lingkungan Muhammadiyah, kami mengikuti aturan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pedoman keuangan dan audit berasal dari sana. Jadi kami tidak mengikuti standar audit umum seperti SA (Standar Audit) yang

biasa digunakan di KAP, karena sifatnya terlalu ketat. Di sini, aturannya lebih kontekstual dan toleran terhadap kondisi lembaga pendidikan.

3. Ketika auditor menemukan indikasi adanya fraud, apa langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan oleh tim audit dalam menangani temuan tersebut?

**Tindakan saat ditemukan indikasi fraud:**

Langkah pertama adalah verifikasi dan pengumpulan data, kemudian penyusunan laporan. SPI memberikan rekomendasi kepada pimpinan, namun tindakan lebih lanjut menjadi kewenangan pimpinan. SPI tidak langsung melakukan tuduhan atau hukuman.

Kami melakukan audit sambil memberikan pembinaan. Jadi bukan hanya memberi teori lalu menunggu laporan selesai. Ketika kami turun ke unit-unit, kami menunjukkan bagaimana seharusnya laporan disusun, serta apa yang tidak sesuai pedoman. Kesalahan yang kami temui biasanya bukan bentuk kecurangan (fraud), tetapi ketidaksesuaian administratif. Misalnya, penggunaan nota atau kuitansi yang dianggap cukup oleh staf, padahal secara akuntansi masih belum memenuhi standar.

**Penanya:**

Pernah menemukan tindakan fraud selama audit?

**Pembicara:**

Kami belum bisa menyimpulkan ada fraud. Paling sering, ada ketidakterbukaan atau kesalahan administrasi. Misalnya, ada pemasukan yang belum dibukukan. Tapi kami tidak langsung menyebut itu sebagai kecurangan. Kami telusuri terlebih dahulu. Biasanya hanya miskomunikasi atau keterlambatan administrasi, bukan fraud besar.

4. Bagaimana hubungan kerja atau kolaborasi antara auditor internal dan SPI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan risiko di kampus ini?

**Kolaborasi SPI dan auditor internal:**

SPI adalah lembaga yang mengoordinasi audit internal dan mengambil auditor dari fakultas, khususnya dosen akuntansi. Tugas SPI mencakup pengawasan, pendampingan, dan pemberian rekomendasi.

Semua pengeluaran dari Biro Administrasi Keuangan (BAK) diverifikasi oleh SPI. Dana dari BAK yang dikucurkan ke fakultas atau UPT harus dipertanggungjawabkan, dan itu diawasi oleh SPI. Kami juga memiliki sistem monitoring digital. Jadi semua proses pengajuan dana, verifikasi, pencairan, hingga pelaporan bisa kami pantau dalam sistem. Contohnya, fakultas mengajukan dana kegiatan, prosesnya terpantau mulai dari rektorat hingga kas besar/kecil. Progresnya terlihat jelas, siapa yang sudah menyetujui dan siapa yang belum.

5. Apakah audit internal kampus saat ini telah memanfaatkan teknologi seperti big data analytics atau software audit? Jika ya, bagaimana teknologi tersebut membantu dalam mendeteksi potensi kecurangan?

**Penggunaan teknologi dalam audit:**

Belum disebutkan penggunaan teknologi seperti big data atau software audit secara eksplisit. Namun, SPI mulai membenahi sistem pencatatan dan pelaporan berbasis

digital sebagai bentuk peningkatan pengawasan (untuk memeriksa atau memantau kegiatan yang dilakukan dalam instansi, bisa dilihat dari web yang bernama CYBER)

**Informan :** Kepala LSPI (Lembaga Sistem Pengawasan Internal)

**Target :** Kebijakan strategis, pelaksanaan pengawasan, struktur dan SOP pengendalian internal, evaluasi, koordinasi antar unit, pencegahan fraud, dan tindak lanjut pengawasan.

**Pertanyaan wawancara :**

1. Bagaimana struktur organisasi LSPI dibentuk dan apa peran utama masing-masing dalam mendukung fungsi pengawasan internal kampus?

**Struktur organisasi dan peran:**

Struktur LSPI tidak memiliki auditor tetap; auditor berasal dari fakultas (FEB). SPI terdiri dari kepala dan sekretaris serta mengoordinasi auditor fakultas. Salah satu tugas utama SPI adalah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi.

2. Apa visi, misi, dan kebijakan strategis LSPI dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan mencegah terjadinya kecurangan di perguruan tinggi?

**Visi, misi, dan kebijakan strategis:**

Visi SPI adalah penguatan sistem pengawasan internal yang akuntabel. Strategi utama: peningkatan kapasitas SDM, penyusunan pedoman internal, dan pembentukan budaya pelaporan yang transparan

3. Bagaimana pelaksanaan audit internal dijalankan oleh SPI, termasuk SOP yang digunakan dan bagaimana mekanisme evaluasi serta monitoring pengendalian internal dilakukan secara rutin?

**SOP audit dan monitoring:**

SPI telah menyusun SOP pengendalian internal dan audit. Audit dilakukan setahun sekali, hasilnya dipresentasikan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM), dan dilanjutkan dengan pendampingan untuk unit yang lemah.

4. Unit kerja mana saja yang dinilai paling rentan terhadap risiko kecurangan, dan bagaimana prosedur SPI dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran atau fraud yang terjadi?

**Unit kerja rentan fraud dan tindak lanjut:**

Unit kerja yang belum tertib pencatatan dinilai paling rentan. Tindak lanjut dilakukan melalui pendampingan, pengumpulan bukti (kuitansi, invoice), dan verifikasi laporan sebelum menyimpulkan adanya fraud

5. Apa saja indikator kinerja utama (KPI) yang digunakan LSPI/SPI untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem pengendalian internal, serta strategi dalam menghadapi tantangan selama proses pengawasan?

**KPI dan strategi menghadapi tantangan:**

KPI meliputi persentase unit dengan pengendalian kuat dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman SDM non-akuntansi. Strateginya adalah pendampingan intensif dan sosialisasi.

6. Bagaimana cara LSPI/SPI menjalin koordinasi dan integrasi pengawasan dengan unit-unit lain, seperti keuangan, akademik, maupun unit penunjang, termasuk dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil audit?



**Koordinasi antar unit:**

Koordinasi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi. SPI aktif mendampingi unit dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai pedoman dan menghindari pelanggaran.

7. Bagaimana pendekatan SPI dalam memastikan nilai-nilai organisasi terinternalisasi dalam budaya kerja, serta bagaimana perlindungan terhadap identitas pelapor (whistleblower) dikelola dengan aman?

**Internalitas nilai dan perlindungan whistleblower:**

SPI menekankan pentingnya integritas, independensi, dan profesionalisme auditor. Pengelolaan whistleblower dilakukan secara tertutup dan hati-hati tanpa langsung menjatuhkan sanksi, khususnya karena nilai-nilai Muhammadiyah yang lebih menekankan pendekatan persuasif

**Informan:** Ketua BAK & Direktur Keuangan

**Target Informasi:** Sistem keuangan, tata kelola anggaran, transparansi, pencegahan fraud, integrasi sistem, dan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi.

**Pertanyaan wawancara :**

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang saat ini digunakan mendukung pengendalian internal dan akuntabilitas di lingkungan kampus?

**Sistem keuangan dan pengendalian internal:**

Sistem keuangan sudah mulai digital, dengan pedoman penyusunan laporan keuangan dan format standar. BAK juga menggunakan sistem verifikasi untuk pencairan anggaran

2. Apakah proses verifikasi berlapis atau sistem validasi ganda sudah diterapkan dalam pengeluaran dan pencairan anggaran? Bisa dijelaskan seperti apa alurnya?

**Verifikasi berlapis dan alur pencairan:**

Pengajuan dana harus disertai LPJ dari sebelumnya. Verifikasi dilakukan oleh BAK, tapi tetap harus ada validasi dari Wakil Rektor II atau rektor. Kepala BAK tidak memiliki kewenangan menentukan jumlah akhir pencairan.

3. Seberapa sering dilakukan evaluasi keuangan di tingkat fakultas atau unit kerja, dan bagaimana tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut?

**Evaluasi keuangan dan tindak lanjut:**

Evaluasi dilakukan rutin setiap tahun dan dalam periode tertentu. Jika terdapat penyimpangan atau kejanggalan, SPI memberi rekomendasi. Namun, keputusan akhir tetap di tangan pimpinan

4. Apa saja langkah nyata yang dilakukan BAK atau Direktorat Keuangan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud dalam proses transaksi maupun pengadaan barang dan jasa?

**Langkah pencegahan fraud:**

Contoh nyata kasus fraud: mark-up harga karangan bunga, penggunaan vendor fiktif, dan manipulasi rekening. Pelapor melakukan investigasi langsung hingga

menemukan bukti. Namun, pimpinan cenderung menyelesaikan secara internal tanpa sanksi tegas

5. Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi laporan keuangan dijaga, dan apakah pelaporannya sudah berbasis digital serta sesuai standar akuntansi yang berlaku?

**Transparansi laporan keuangan:**

Setelah adanya pedoman dan sistem digital, laporan menjadi lebih transparan dan tertib. LPJ wajib dilampirkan dengan bukti fisik (invoice, kuitansi).

6. Apakah sistem informasi keuangan sudah terintegrasi dengan sistem pengawasan internal seperti SPI/LSPI, dan sejauh mana integrasi ini membantu dalam pengawasan anggaran?

**Integrasi sistem keuangan dan SPI:**

Integrasi berjalan, namun belum optimal. SPI masih sering turun tangan langsung karena informasi dari BAK belum selalu tersampaikan ke unit kerja.

7. Jika pernah terjadi penyimpangan atau masalah dalam keuangan, bagaimana mekanisme penanganannya, dan apa tantangan terbesar dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan kampus?

**Penanganan penyimpangan dan tantangan:**

Penyimpangan sering diselesaikan secara internal. Tantangan besar: tekanan politis, budaya organisasi yang toleran terhadap pelanggaran kecil, serta keterbatasan sistem dan SDM di keuangan